

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Pertumbuhan Ekonomi**

##### **1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Sinom Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.<sup>1</sup>

Pertumbuhan ekonomi adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat harga berlaku, namun agar dapat melihat pertambahan dari suatu kurun waktu berikutnya harus dinyatakan pada nilai riil artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi didaerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan

---

<sup>1</sup> Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2016),57

teknologi) yang berarti secara kasar menggambarkan kemakmuran daerah tersebut.<sup>2</sup>

## **2. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Ada beberapa model pertumbuhan ekonomi yang berkembang hingga saat ini, yaitu : Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Teori Pertumbuhan Neo Klasik, Model Pertumbuhan Interegional, dan Teori Pertumbuhan Harrod-Domar dalam madzhab analisisnya.

Pertumbuhan ekonomi tidak akan lepas dari adanya pertumbuhan output dan penambahan penduduk setiap tahunnya yang memungkinkan untuk penambahan tenaga kerja sehingga pendapatan menjadi merata dan terciptanya kesejahteraan yang diharapkan. Dalam aliran klasik yang dipelopori Adam Smith yang menurut teorinya bahwa :<sup>3</sup>

Pertumbuhan ekonomi disebabkan karena faktor perkembangan jumlah penduduk dan pembentukan modal. Dengan adanya akumulasi modal akan memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi atau pembagian kerja sehingga produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan, dampaknya

---

<sup>2</sup> Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* (Jakarta:PT Bumi Aksara,2005), 46.

<sup>3</sup> Rahardjo Adisasmita, *Ekonomi Archipelago*, (Yogyakarta :Graha Ilmu,2018), 14.

mendorong penambahan investasi (pembentukan modal) dan persediaan yang diharapkan dapat meningkatkan kemajuan teknologi dan menambah pendapatan. Bertambahnya pendapatan berarti berarti meningkatkan kemakmuran (kersejahteraan) penduduk. Peningkatan kemakmuran mendorong bertambahnya jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan hukum pertambahan hasil yang berkurang (*low of diminishing return*) yang selanjutnya akan menurunkan akumulasi modal.

Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh Meade yang dirancang untuk menjelaskan bagai bentuk paling sederhana dari sistem ekonomi klasik akan berperilaku selama pertumbuhan ekuilibrium. Model tersebut dibangun dengan menggunakan asumsi-asumsi : perekonomian tertutup dengan sistem bebas yang didalamnya terdapat persaingan sempurna, “return to scale” konstan, dalam perekonomian tersebut diproduksi dua jenis barang yaitu barang konsumsi dan barang modal, mesin satu-satunya bentuk modal, semua mesin diasumsikan serupa, harga barang konsumsi dalam uang diasumsikan serupa, dll.

Di dalam perekonomian sebagai digambarkan diatas, *output* bersih diproduksi tergantung pada empat faktor : 1) stok modal

netto yang tersedia dalam bentuk mesin ; 2) jumlah tenaga buruh tersedia; 3) tanah dan sumber alam tersedia; 4) keadaan pengetahuan teknik yang terus membaik sepanjang waktu.

Maka dari teori neoklasik juga membagi tiga jenis input yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi, Pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi, pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi.

$$Y=F (K,L,N,t)$$

Dimana Y adalah output, K adalah modal, L adalah angkatan kerja yang bekerja, N adalah tanah dan sumber alam, t adalah waktu yang menandakan kemajuan teknik.<sup>4</sup>

Model pertumbuhan interregional adalah perluasan dari teori berbasis ekspor, yaitu dengan dengan menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen yang berarti tidak terikat kepada kondisi internal perekonomian wilayah. Model ini hanya membahas satu daerah dan tidak memperhatikan dampak dari daerah lain, maka model ini disebut dengan model interregional. Teori ini sebenarnya merupakan perluasan dari teori basis ekspor sehingga

---

<sup>4</sup> Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), 265.

diasumsikan selain ekspor, pengeluaran pemerintah dan investasi bersifat eksogen dan saling terkait dengan satu sistem dari daerah lain. Teori neoklasik berpendapat faktor teknologi ditentukan secara eksogen dari model. Kekurangan dalam keberadaan teknologi ini yang menyebabkan munculnya teori baru yaitu teori pertumbuhan endogen.

Teori Harrod-Domar menyatakan bahwasannya supaya seluruh barang modal yang tersedia dapat digunakan sepenuhnya, permintaan agregat harus bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang modal yang terwujud sebagai akibat dari investasi masa lalu. Jadi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang baik maka nilai investasi dari tahun ketahun harus selalu naik.<sup>5</sup>

### **3. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi**

Berikut ini gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut :

#### **a. Akumulasi Modal**

Akumulasi modal akan terjadi apabila ada bagian pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian

---

<sup>5</sup> Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 47-53.

diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Pabrik, mesin, peralatan dan barang-barang baru akan meningkatkan stok modal fisik suatu negara (yaitu jumlah nilai bersih dan semua barang-barang modal produktif fisik) sehingga pada gilirannya akan memungkinkan negara tersebut untuk mencapai tingkat output yang lebih besar.<sup>6</sup>

### **b. Pertumbuhan Penduduk**

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (labor force) secara tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja, berarti semakin banyak juga faktor produksi tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan pasar domestik.<sup>7</sup>

### **c. Kemajuan Teknologi**

Kemajuan teknologi bisa bersifat hemat tenaga kerja dan hemat modal yaitu tingkat output lebih tinggi bisa dicapai jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama.<sup>8</sup> Kemajuan

---

<sup>6</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2014), 214.

<sup>7</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Cetakan Pertama*, 215.

<sup>8</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Cetakan Pertama*, 219.

teknologi akan melahirkan *trade off* terhadap kesempatan kerja dan memperbesar ketimpangan ekonomi antar bangsa, utamanya antar negara maju dengan negara berkembang.<sup>9</sup>

#### **d. Manajemen**

Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern, terutama bagi perekonomian yang mengandalkan pasar. Sistem manajemen yang baik, terkadang jauh lebih berguna dibanding barang modal yang banyak uang yang berlimpah dan teknologi tinggi. Ada perekonomian yang tidak mengandalkan teknologi, namun berkat manajemen yang baik, mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.<sup>10</sup>

#### **e. Kewirausahaan (*Entrepreneurship*)**

Kewirausahaan secara sederhana didefinisikan sebagai kemampuan dan keberanian mengambil risiko untuk memperoleh keuntungan. Para wirausahawan/ pengusaha harus mempunyai pemikiran yang matang bahwa input yang dikombinasikannya akan dihasilkan barang dan jasa yang

---

<sup>9</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, 90.

<sup>10</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, 91.

dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga timbal baliknya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan.<sup>11</sup>

*Thomas W. Zimmerer et al* (2005) merumuskan manfaat kewirausahaan adalah sebagai berikut dapat (a) memberikan peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib diri sendiri; (b) memberikan peluang untuk perubahan dalam kehidupan pembisnis itu sendiri. (c) keberhasilan pembisnis dalam berwirausaha karena pembisnis terus menggali potentesi diri sepenuhnya untuk selalu kreatif, antusias, berinovasi; (d) memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin; (e) memiliki peran aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya; (f) memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya.<sup>12</sup>

#### **f. Informasi**

Syarat agar pasar berfungsi sebagai alokasi sumber daya ekonomi yang efisien adalah informasi yang sempurna dan seimbang (*perfect and simetric information*). Kegagalan pasar merupakan akibat tidak terpenuhinya asumsi ini. Sebab semakin

---

<sup>11</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, 92.

<sup>12</sup> Leonardus Saiman, *Kewirausahaan*, (Jakarta :Salemba Empat), 44.



banyak, semakin benar dan semakin berimbang arus informasi, para pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan dengan lebih baik dan cepat, sehingga sumber daya ekonomi makin efisien. Maka dari pernyataan tersebut amat menunjang pertumbuhan ekonomi.<sup>13</sup>

Jadi dalam melihat tingkat suatu pertumbuhan ekonomi dengan perhitungan setiap periode. Akumulasi modal adalah penimbunan, penghimbunan, pengumpulan / tabungan persediaan modal dalam suatu perekonomian untuk meningkatkan setiap sektor disetiap wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan output yang dihasilkan oleh tenagakerja, Pertumbuhan penduduk yaitu banyaknya permintaan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh tingkat upah minimum pada suatu wilayah dengan harapan meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk yang bekerja. Sistem manajemen yang baik dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi, kewirausahaan yang timbal baliknya memberikan keuntungan bagi perusahaan, serta informasi sempurna dan seimbang.

---

<sup>13</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, 91.

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam

Hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah penggunaan parameter *falah*. *falah* adalah kesejahteraan yang sebenar-benarnya dimana komponen-komponen rohaniah masuk kedalam pengertian *falah* ini. Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang dapat mengantarkan umat manusia kepada *real welfare* (*falah*). Selain memasukan unsur *falah* dalam menganalisis kesejahteraan penghitungan PDB berdasarkan islam harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Beberapa keterbatasan pengguna PDB riil/kapita sebagai indikator kesejahteraan antara lain : a) hanya produk yang masuk pasar yang dihitung dalam PDB, sebaliknya produk yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri tidak tercakup dalam perhitungan PDB. b) PDB tidak menghitung alokasi waktu istirahat (*leisure time*). Padahal alokasi waktu istirahat ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan. c) Kejadian buruk seperti bencana alam tidak dihitung dalam PDB, padahal sangat jelas tingkat kesejahteraan korban bencana alam mengalami

penurunan. d) Masalah polusi juga sering tidak dihitung dalam PDB. banyak sekali industri yang dalam kegiatan industrinya menghasilkan polusi air, tanah maupun udara yang terlihat jelas akan merusak lingkungan yang akan mengurangi kesejahteraan.<sup>14</sup>

Islam berusaha supaya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya agar dapat menghasilkan produksi sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, kebebasan mutlak kepada hal milik, tanpa ada pencegahan terhadap kelampauan batas yang dilakukan oleh para pemilik maupun pencegahan terhadap keluar keluarnya mereka dari jalan yang benar dalam pemanfaatan alam, merupakan aturan yang bertentangan dengan Islam. Islam dalam pemanfaatan sumber daya alam (Mujahidin, 2013) memberikan petunjuk sebagai berikut : 1) Alquran dan Sunnah memberikan peringatan bahwa alam telah ditundukan untuk umat manusia sebagai salah satu rezeki; 2) Manusia adalah khalifah Allah SWT yang bertugas untuk mengatur, memanfaatkandan memberdayakan alam dimuka bumi. Sedangkan pemilik hakiki adalah Allah SWT. 3) Islam mengizinkan pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan seseorang maupun untuk orang banyak. 4) Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam harus

---

<sup>14</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, 26.

memerhatikan hukum-hukum yang telah Allah SWT yaitu menjaga, memelihara, dan memakmurkannya.

## **B. Upah**

### **1. Pengertian Upah**

Hasibuan mengemukakan bahwa upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya. Jadi yang di maksud dengan upah yaitu sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada pekerja berdasarkan jam kerja , jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, tingkat upah yang terjadi karena hasil bekerjanya dan permintaannya.<sup>15</sup> Pengertian upah menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mendefinisikan bahwa:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan

---

<sup>15</sup> Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014), 122.

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”<sup>16</sup>

## 2. Teori Upah

Adapun teori tentang upah yaitu sebagai berikut :

### a. Teori Upah Dana Menurut Stuart Mill Senior

Menurut teori upah dana buruh tidak perlu menantang seperti yang disarankan oleh teori undang-undang upah besi, karena upah yang diterimanya itu sebetulnya adalah berdasarkan kepada besar kecilnya jumlah dana yang ada pada masyarakat.

### b. Teori Upah Besi dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle

Penerapan sistem upah kodrat menimbulkan tekanan terhadap kaum buruh, karena kita ketahui posisi kaum buruh dalam posisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah yang telah ditetapkan oleh produsen. Berhubungan dengan kondisi tersebut maka teori ini dikenal dengan istilah “Teori Upah Besi”. Untuk itulah Lassalle menganjurkan untuk menghadapi kebijakan para produsen terhadap upah agar dibentuk serikat pekerja.

---

<sup>16</sup> Asri Wijyanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi Cetakan Ke-4*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 107

c. Teori Upah Etika

Menurut kaum Utopis (kaum yang memiliki idealis masyarakat yang ideal) tindakan para pengusaha yang memberikan upah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, merupakan suatu tindakan yang tidak “*etis*”. Oleh karena itu sebaiknya para pengusaha selain dapat memberikan upah yang layak kepada pekerja dan keluarganya, juga harus memberikan tunjangan keluarga.<sup>17</sup>

### 3. Jenis- Jenis Upah

Jenis-jenis upah dalam berbagai kepustakaan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja menurut Zaeni Asyhadie dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>18</sup>

a. Upah nominal.

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja atau buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam perjanjian.

---

<sup>17</sup> Maimun Sholeh, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, *Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Upah: Teori serta Beberapa Potretnya di Indonesia*, Volume 4 Nomor 1, April 2007.

<sup>18</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), 70.

b. Upah Nyata.

Upah nyata adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima oleh seorang pekerja/buruh yang berhak.

c. Upah Hidup.

Upah hidup yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

d. Upah Minimum.

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya.

e. Upah Wajar.

Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan.

#### **4. Proses Penentuan Upah**

Rivai mengemukakan bahwa salah satu aspek yang sangat penting dalam penentuan upah adalah jumlah upah yang diterima

karyawan harus memiliki *internal equity* dan *external equity*. *Internal equity* adalah jumlah yang diperoleh atau dipersepsi sesuai dengan input yang diberikan dibandingkan dengan pekerjaan yang sama dengan perusahaan. *external equity* adalah merupakan jumlah yang diterima dibandingkan yang diterima dengan pekerjaan yang sejenis diluar organisasi. Oleh karena itu, untuk mengusahakan adanya *equity*, penentuan upah oleh perusahaan dapat ditempuh dengan sebagai berikut: <sup>19</sup>

**a. Menganalisis jabatan/tugas**

Untuk mengetahui tuntutan-tuntutan dari suatu jabatan, perlu dilakukannya suatu kegiatan yang dinamakan analisis jabatan. Analisis jabatan/tugas merupakan kegiatan untuk mencari informasi tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan suatu tugas.<sup>20</sup> Analisis jabatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) mengidentifikasi tugas-tugas dan perilaku yang diperlukan.

---

<sup>19</sup> Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 145.

<sup>20</sup> Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, 146.

<sup>21</sup> CHR. Jimmy L. Gaol, *Human Capital*, 142.



- 2) Melakukan spesifikasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan (tugas-tugas dalam suatu jabatan).

#### **b. Mengevaluasi jabatan**

Mengevaluasi jabatan merupakan proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain.<sup>22</sup> Maksud dari evaluasi jabatan adalah menetapkan jabatan-jabatan mana yang harus dibayar lebih kecil dibandingkan jabatan lainnya. Karena evaluasi bersifat subjektif, maka sampai sekarang evaluasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat seperti komputer.

Berikut adalah tiga pandangan mengenai evaluasi jabatan dari segi karyawan/pegawai, dari segi pemerintah dan dari segi pengusaha:<sup>23</sup>

- 1) Dari segi karyawan/pegawai

Adanya metode dasar pengupahan evaluasi jabatan menjamin konsistensi internal dan eksternal, sehingga

---

<sup>22</sup> Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, 147.

<sup>23</sup> CHR. Jimmy L. Gaol, *Human Capital*, 325.

menjamin dan membantu meningkatkan moral kerja karyawan.

2) Dari segi pemerintah

Penggunaan sistem pengupahan evaluasi jabatan secara keseluruhan berarti mempercepat jalannya pembangunan, karena memungkinkan adanya ahli berbagai sektor dan tidak disatu sektor.

3) Dari segi pengusaha

Penggunaan metode evaluasi jabatan menghilangkan atau paling tidak mengurangi keluhan kesah karyawan khususnya yang berkenaan dengan sistem pengupahannya. Evaluasi jabatan dapat memperbaiki hubungan harmonis antara pengusaha dengan pekerja.

**c. Melakukan survei upah**

Survei upah merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat upah yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan sejenis.<sup>24</sup> Untuk menetapkan suatu standar kompensasi yang adil, biasanya beberapa perusahaan melakukan survei. Dari survei tersebut menghasilkan *labor market* yang sama membayar juga jabatan-jabatan kunci yang spesifik.

---

<sup>24</sup> Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, 148.

*Labor market* adalah tempat dimana perusahaan merekrut pegawai. Beberapa perusahaan harus bersaing memperoleh pegawai dari *labor market*. Data yang berasal dari survei merupakan tanda bagi analisis untuk membandingkan tingkatan-tingkatan kompensasi. Informasi mengenai survei dapat diperoleh melalui beberapa cara. Dalam *labor market* yang cepat berubah, hasil survei bisa saja sudah ketinggalan-jaman sehingga dibutuhkan beberapa sumber lainnya. Beberapa sumber dana kompensasi lainnya bisa didapatkan dari Departemen Tenaga Kerja, Asosiasi pengusaha, dan Asosiasi Profesional/Ahli.

#### **d. Menentukan tingkat upah**

Dalam penentuan upah diupayakan memenuhi tingkat kelayakan yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>25</sup> Level pembayaran yang tepat untuk mencerminkan nilai relatif dan nilai mutlak dari jabatan yang bersangkutan.

Penetapan struktur tingkat pengupahan ditentukan oleh banyak faktor. Pengupahan merupakan unsur penting dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan untuk memenuhi kebutuhan pada karyawan, maka perusahaan harus melakukan

---

<sup>25</sup> Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, 152.

perencanaan pengupahan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, dan tingkat usaha yang dilakukan dalam pekerjaan.

### **5. Penyusunan Upah.**

Dewan penelitian nasional mendefinisikan upah sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/ jasa yang telah dan yang akan dilakukan serta berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi.<sup>26</sup>

Penyusunan upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Gaji dan upah dapat disusun menurut *prestasi kerja, lama kerja, senioritas, dan kebutuhan*.

- a. *Upah menurut prestasi kerja*; pengupahan dengan cara ini langsung mengaitkan besarnya upah dengan prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan.
- b. *Upah menurut lama kerja*; cara ini disebut juga dengan *sistem waktu*. Besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara

---

<sup>26</sup> Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 189.

menghitungnya dapat menggunakan *per jam, per hari, per minggu atau per bulan*.

- c. *Upah menurut senioritas*; cara pengupahan ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas karyawan yang bersangkutan dalam suatu organisasi. Dasar pemikirannya adalah karyawan senior menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi pada organisasi tempat mereka yang bekerja. Semakin senior seorang karyawan, semakin tinggi loyalitasnya pada organisasi.
- d. *Upah menurut kebutuhan*; cara pengupahan ini menunjukkan upah para karyawan didasarkan pada urgensi kebutuhan karyawan. Ini berarti upah yang diberikan wajar apabila dapat dipergunakan untuk memenuhi kehidupan yang layak sehari-hari (kebutuhan pokok minimum), tidak kelebihan, tetapi juga tidak kekurangan.<sup>27</sup>

## **6. Sistem Upah Yang Berlaku Di Indonesia**

Di Indonesia dikenal sistem pemberian upah, yaitu sebagai berikut :<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, h. 191

<sup>28</sup> Sukwianty, Sudirman Jamal, Slamet Sukamto, *Ekonomi*, diakses dari <http://books.google.co.id> pada tanggal 7 januari 2018.

a. Upah Menurut Waktu

Menurut sistem ini, besar upah didasarkan pada lama bekerja seseorang. Satuan waktu di hitung perjam, perhari, perminggu atau perbulan.

b. Upah Menurut Satuan Hasil Menurut sistem ini, besarnya upah berdasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja. Satuan hasil dihitung perpotong barang, per satuan panjang atau persatuan berat.

c. Upah Borongan

Pembayaran upah borongan didasarkan kepada kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerja. Sistem ini biasanya diterapkan untuk pekerjaan yang sulit dihitung persatuan, sistem ini biasanya untuk pengupahan pada jasa seperti bengkel mobil, pembangunan gedung dan sebagainya.

1) Sistem Bonus

Sistem ini merupakan untuk memperbaiki kelemahan cara pembayaran upah pada poin dua jenis pemberian upah sebelumnya. Bonus adalah pembayaran tambahan diluar upah atau gaji yang ditujukan untuk merangsang (insentif)

agar para pekerja menjalankan tugas lebih baik dan penuh tanggung jawab.

## 2) Sistem Mitra Usaha

Pembayaran upah dalam sistem ini diberikan dalam bentuk saham perusahaan. Saham tersebut tidak diberikan pada pekerja secara perorangan, tetapi kepada organisasi pekerja sebagai pemegang saham dianggap ikut memiliki perusahaan tersebut. Hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja semula dikenal sebagai majikan dan buruh meningkat menjadi hubungan antara perusahaan dan mitra kerja.

## **C. Upah Minimum**

### **1. Pengertian Upah Minimum**

Upah minimum diartikan sebagai ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan kebutuhan hidup layak kepada pekerja/buruh yang paling rendah tingkatnya yang merupakan perlindungan bagi kelompok pekerja lapisan bawah atas pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja maksimal

1 tahun, agar memperoleh upah serendah-rendahnya sesuai dengan kebutuhan hidup minimum.<sup>29</sup>

Menurut Sony Sumarno, upah minimum merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektor regional, maupun sub sektoral. Dalam hal ini upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan. Upah minimum juga merupakan upah pokok yang diatur secara minimal baik regional, sektoral maupun sub sektoral. Sementara itu menurut Case & Fair (2005:533) adalah upah yang paling rendah yang di izinkan untuk dibayar oleh perusahaan oleh para pekerjanya.<sup>30</sup>

Sedangkan upah minimum berdasarkan *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 Tentang “Upah Minimum”*, Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku dalam satu provinsi.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar Cetakan Kedua*, (Jakarta:Kresna Presma Persada,2007),h.50

<sup>30</sup> Ninda Noviani Carysa, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011*, Volume 2, Nomor 4,2013.

<sup>31</sup> SI Pedia, “*Pengertian UMR UMP dan UMK*”, diakses dari <http://www.si-pedia.com/2016/01/pengertian-umr-ump-dan-umk.html>, pada tanggal 5 November 2016 pukul 21.28



Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum terbagi atas :

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Besar upah ini untuk tiap wilayah provinsi atau kabupaten/kota tidak sama, tergantung nilai kebutuhan hidup layak (KHL) di daerah bersangkutan. KHL adalah standar kehidupan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja untuk dapat hidup layak secara fisik, nonfisik dan sosial.
- b. Upah minimum berdasarkan sektor/sub sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum sektoral ditetapkan berdasarkan kelompok usaha tertentu misalnya kelompok usaha manufaktur dan non manufaktur.<sup>32</sup>

Penetapan upah minimum yang merupakan suatu perlindungan upah kepada pekerja sebagaimana diungkapkan oleh Furqon mengenai upah minimum sebelumnya yaitu:

Upah minimum yang diatur oleh pemerintah yang ide awalnya merupakan jaring pengaman agar perusahaan minimal

---

<sup>32</sup> Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar Cetakan Kedua*, 50

membayarkan upah dengan harapan kebutuhan dasar bagi kehidupan pekerja relatif mendekai terjangkau. Namun kenyataannya pekerja sehingga belum berhasil menciptakan hubungan industrial yang diharapkan. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, terdapat alternatif, sistem pemberian upah pekerja yang ditawarkan dengan konsep yang ideal dalam penetapan upah yakni keterlibatan pekerja. Karena mereka justru yang lebih mengetahui kondisi perusahaannya, kemudian dari sisi manajemen ditunjuk pihak-pihak berkompeten dalam penetapan upah.<sup>33</sup>

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (MENAKER), berdasarkan *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015* tentang “*Pengupahan*”, penetapan upah minimum dilaksanakan menggunakan formula perhitungan upah minimum. Adapun formulanya adalah  $UM_n = UM_t + \{ UM_t \times (Inflasi_t + \% \Delta PDRB_t) \}$

Maka untuk menghindari pemberian upah yang tidak sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan maka terdapat langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan cara kedua belah pihak melakukan perundingan atau negoisasi. Adapun yang diperoleh dengan cara tersebut adalah *pertama*, upah mencerminkan kemampuan

---

<sup>33</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 110.

perusahaan dan kemauan pekerja yaitu perusahaan yang mempunyai kinerja baik akan memberikan kesejahteraan yang baik pula bagi pekerja. *Kedua*, fungsi upah sebagai dorongan motivasi karena pekerja akan memaksimalkan produktivitasnya agar perusahaan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Karena kinerja yang baik akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik pula.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum**

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2013, faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

### *a. Produk Domestik Regional*

*Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) merupakan nilai tambah bruto keseluruhan barang dan jasa yang tercipta dan dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan faktor faktor produksi yang memiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3

pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran.<sup>34</sup>

b. Kebutuhan Hidup Layak

Sejak ditetapkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum. Berdasarkan Permenaker No. 17 Tahun 2005, tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL, yang dimaksud dengan KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan satu bulan.

c. Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen atau IHK adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur perkembangan harga dari sejumlah barang dan jasa (paket komoditas) yang dibayar oleh konsumen/ rumahtangga, khususnya konsumen di perkotaan. IHK hanya mengukur perubahan harga dan bukan tingkat harga. Adapun komponen dalam perhitungan IHK yaitu sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Hendro Prayitno, *Produk Domestik Bruto Provinsi Banten Menurut Lapangan Usaha 2012-2016*, (BPS Provinsi Banten: CV. Dharmaputra, 2016), 4.

### 1. Paket Komoditas

Paket komoditas IHK berisi sejumlah barang dan jasa yang umumnya dibeli oleh konsumen/rumah tangga di kota tertentu atau menentukan harga-harga yang paling penting dengan pemberian bobot tertentu.

### 2. Diagram Timbang dan Nilai Konsumsi.

Diagram timbang atau bobot IHK dihitung berdasarkan proporsi pengeluaran/nilai konsumsi setiap jenis barang dan jasa terhadap total pengeluaran/nilai konsumsi dari hasil Survei Biaya Hidup (SBH).

### 3. Tahun dasar

Memilih satu tahun dari tahun basis yang merupakan tolak ukur yang menjadi bandingan tahun-tahun yang lainnya. Untuk menghitung indeksnya, harga barang, dan jasa untuk setiap tahun dibagi dengan harga keranjang pada tahun basis. Perbandingan ini kemudian dikalikan dengan 100. Angka hasilnya adalah indeks harga konsumen.

### 4. Pengumpulan Data Harga

Pengumpulan data harga konsumen dilakukan oleh petugas Survei Harga Konsumen. Seperti halnya pada

pelaksanaan pencacahan harga konsumen sebelumnya, maka dalam penghitungan IHK.<sup>35</sup>

### 3. Dasar Penetapan Upah Minimum

Beberapa dasar pertimbangan dari penetapan upah minimum adalah sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak melorot dibawah kebutuhan hidup minimum.
- b. Sebagai wujud pelaksanaan Pancasila, UUD 45, dan GBHN secara nyata.
- c. Agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat yang memiliki kesempatan, tetapi perlu menjangkau sebagian terbesar masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarganya.
- d. Sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan penumbuhan kelas menengah.
- e. Kepastian hukum bagi perlindungan atas hak-hak dasar buruh dan keluarganya sebagai warga negara Indonesia.

---

<sup>35</sup> Badan Pusat Statistik, *Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Banten 2016*, (BPS Provinsi Banten : CV. Dharmaputra, 2016), 8.

<sup>36</sup> Yussy Santoso, Ronnie Masman, *A Pratical Guindance To Executive Compensation Management*, (Jakarta: PT Gramedia, 2016), 20.

- f. Merupakan indikator perkembangan ekonomi pendapatan perkapita.

#### **4. Mekanisme Penetapan Upah Minimum**

Peraturan pelaksanaan terkait upah minimum diatur dalam Permenakertrans No. 01 Tahun 1999 tentang upah minimum, Kepmenatrans No. 226/MEN/2000 tentang perubahan beberapa pasal dalam Permenakertrans No. 01 tahun 1999.

Penetapan upah minimum dilakukan di tingkat Provinsi atau di tingkat kabupaten/kota, dimana gubernur menetapkan besaran upah minimum Provinsi atau upah minimum kabupaten/kota, berdasarkan usulan dari komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota) dengan mempertimbangkan, kebutuhan hidup pekerja, indeks harga konsumsi, pertumbuhan ekonomi kondisi pasar dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Yussy Santoso, Ronnie Masman, *A Pratical Guindance To Executive Compensation Management*, 21.

Berikut ini adalah mekanisme penetapan upah minimum:<sup>38</sup>

- a. Usulan besaran upah minimum yang disampaikan oleh dewan pengupahan merupakan hasil survei kebutuhan hidup seorang pekerja lajang. Dalam ketentuannya yang terbaru kebutuhan seorang pekerja lajang diatur dalam Permenakertrans No. 13 tahun 2012 tentang komponen dan pentahapan kebutuhan hidup layak, dalam peraturan ini, pemerintah menetapkan 7 kelompok dan 60 komponen kebutuhan bagi buruh/pekerja lajang yang menjadi dasar dalam melakukan survei harga dan menentukan besaran nilai upah minimum.
- b. Selain upah minimum sebagai tersebut tadi, gubernur juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang didasarkan pada kesepakatan upah antara organisasi perusahaan dengan serikat pekerja sehingga upah dapat terdiri dari Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

---

<sup>38</sup> Yussy Santoso, Ronnie Masman, *A Pratical Guindance To Executive Compensation Management*, 23-24.



- c. Sekalipun terdapat beberapa ketentuan upah minimum, namun upah minimum yang berlaku bagi setiap buruh/pekerja dalam suatu wilayah pada suatu industri tertentu hanya satu jenis upah minimum.
- d. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat penangguhan upah minimum diatur dalam Kepmenakertrans Nomor : Kep-231/MEN/2003 Tentang tata Cara Penangguhan Upah Minimum.
- e. Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan oleh pengusaha kepada gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang kertenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum. Permohonan penangguhan sebagaimana di maksud ayat [1] didasarkan atas tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh yang tercatat. Lebih jelasnya mengenai penetapan upah minimum dapat dilihat dari tabel dibawah ini.



**Gambar 2.1 Mekanisme Penetapan Upah Minimum**

## 5. Upah Minimum Dalam Perspektif Islam

Penentuan upah yang adil dalam perspektif ekonomi islam, maka ada fakta yang berkaitan dengan aktivitas ketenagakerjaan itu sendiri. Bahwa aktivitas dengan jual-beli dengan sewa tenaga itu adalah aktivitas yang berbeda. Sebab, harga (*tsaman*) yang diterima seorang adalah kompensasi dari barang yang diberikan. Sedangkan upah (*ujroh*) yang diterima seorang pekerja itu adalah kompensasi dari tenaga yang ia berikan. Dasar penentuan upah adalah manfa'at yang telah diberikan oleh pekerja kepada majikannya. Penentuan upah tidak boleh dikaitkan dengan tinggi rendahnya nilai barang, laku atau tidak nya penjualan dari barang tersebut.

Adapun definisi syar'i tentang ketenagakerjaan sebagai berikut (an-Nabhani, 2003, as-Sabatin ,2009):

*“al-ijarah adalah aqad atas suatu manfa'at dengan imbalan atau upah”*

Dengan definisi di atas kita dapat memahami bahwa dalam dasar penentuan upah dalam ekonomi Islam adalah manfa'at. Selanjutnya kita dapat mendefinisikan manfa'at secara syar'i adalah sebagai berikut :

*“Manfa'at adalah kelayakan atau kemampuan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia”*

Istilah dari di atas dapat muncul dari dua kemungkinan, yaitu : manfaat yang muncul dari aktivitas manusia dan manfaat muncul dari barang. Maka dari itu, dalam ekonomi islam penentuan upah minimum tidaklah diperbolehkan karena dengan upah minimum, karena upah (*ujroh*) yang didapatkan oleh tenagakerja bukanlah sesuai dengan tenaga yang ia berikan melainkan berdasarkan kebutuhan fisik minimum (KFM). Dengan kata lain, walaupun sudah ada peran pemerintah dalam penentuan besaran upah butuh

yang “adil”, pada hakikatnya yang dapat dianggap sebagai “pemenangnya” tetaplah ada di kaum majikan.<sup>39</sup>

#### **D. Hubungan Antar Variabel**

Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi kehidupan perbaikan kehidupan agama, sosial, dan kemasyarakatan.<sup>40</sup>

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap Negara akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna untuk menurunkan angka kemiskinan. Di banyak negara di dunia syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah

---

<sup>39</sup> Dwi Condro Triono, *Ekonomi Pasar Syari'ah*, ( Yogyakarta : Irtikaz, 2016), 282-288.

<sup>40</sup> Almizan, “*Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Dalam Ekonomi Islam*,” *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam – Volume 1, Nomor 2*, (Juli – Desember 2016).

pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang semakin berkurang dan daya beli masyarakat yang meningkat. Daya beli yang meningkat dan merata salah satunya bisa dilihat dari distribusi barang dan jasa yang bersangkutan.<sup>41</sup> Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Selain dari sisi konsumsi dari sisi permintaan, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan

---

<sup>41</sup> Arius Junaidi, Jurnal Kajian Ekonomi, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia, Volume 1 Nomor 1, April 2012.*

ketimpangan dalam penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), peningkatan kemiskinan.<sup>42</sup>

Dapat disimpulkan, dengan adanya upah yang mencukupi KHL, akan mempengaruhi peningkatan konsumsi yang disertai meningkatnya daya beli masyarakat.

### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran terkait penelitian yang akan dilakukan. Bantuan yang bisa didapat ialah berupa gambaran tentang bagaimana menyusun kerangka berpikir, bagaimana mengelola data dan memberikan gambaran objek yang diteliti melalui hasil yang telah dijabarkan oleh penelitian terdahulu. Berikut hasil penelitian terdahulu :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Judul, dan Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Neng Sova Ruanda S, Pengaruh <i>Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap</i>	Menggunakan metode analisis regresi linear berganda,	Lokasi penelitian, menggunakan sampel <i>non-probability sampling</i> ,

<sup>42</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*.(Bogor:Ghalia Indonesia,2016), 46.

	<i>Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Banten, 2017</i>	<p>sedangkan penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana.</p> <p>Menggunakan data sekunder <i>time series</i>, sedangkan penelitian ini menggunakan data panel.</p> <p>Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen dan upah sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian ini menggunakan upah sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen.</p>	menggunakan data PDRB dan upah minimum.
2.	Ninda Novia Charysa, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi	Lokasi penelitian dan tahun penelitian.	Menggunakan data panel yaitu gabungan time series dan cross

	<p>Terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011, 2013</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen dan upah sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian ini menggunakan upah sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen.</p>	<p>section., Menggunakan data PDRB dan upah minimum.</p>
3.	<p>Rini Sulistiawati, Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Di Indonesia, 2012</p>	<p>Lokasi dan tahun penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana.</p>	<p>Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu gabungan time series dan cross section.</p>



## F. Hipotesis

Kata hipotesis berasal dari kata *hipo* yang berarti lemah dan *tesis* yang berarti pernyataan. Dengan demikian, hipotesis berarti pernyataan yang lemah, karena masih berupa dugaan yang belum diuji. Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui riset.<sup>43</sup>

Pengujian hipotesis akan membawa kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis. Agar pemilihnya lebih terperinci dan mudah, maka di perlu hipotesis alternatif yang selanjutnya disingkat *Ha* dan hipotesis nol yang disingkat *Ho*. *Ha* cenderung dinyatakan kalimat positif. Sedangkan *HO* dinyatakan dalam kalimat negatif.

Adapun dugaan sementara dalam penelitian ini adalah :

Ho : Tidak terdapat pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Banten tahun 2010-2016.

Ha : Terdapat pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Banten tahun 2010-2016.

---

<sup>43</sup> Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2009), 53.